



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI
DALAM RANGKA
UPAYA PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU
GUNA MENJAGA PASOKAN SAPI DAN DAGING SERTA
UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR AKIBAT LIMBAH
INDUSTRI PENGOLAHAN MIE SOUN
DI KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH**

*

**

**

*

JAKARTA 2022



**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI
DALAM RANGKA
UPAYA PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU
GUNA MENJAGA PASOKAN SAPI DAN DAGING SERTA
UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR AKIBAT LIMBAH
INDUSTRI PENGOLAHAN MIE SOUN
DI KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH
16 s.d. 18 JUNI 2022**

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ini adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
 - b. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja;
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 28 Maret 2022;
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 18 Mei 2022.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI, untuk mengetahui secara mendalam sejauhmana langkah

penanganan dan pengendalian wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang telah dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Penanganan tentu saja tidak terbatas pada pencegahan penyebaran penyakit yang lebih meluas, namun juga penanganan yang berkaitan dengan kerugian secara ekonomi atau materiil, hingga penanganan secara hukum. Selain itu, Tim Komisi IV DPR RI juga ingin mengetahui secara mendalam terkait upaya pengendalian pencemaran air akibat limbah industri pengolahan mie soun.

Tim Komisi IV DPR RI juga ingin menggali informasi serta mendiskusikan hal-hal yang menjadi permasalahan serta upaya penyelesaiannya berkaitan dengan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan juga pencemaran air akibat limbah industri pengolahan mie soun di Kabupaten Klaten.

C. TIM KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Anggia Ermarini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB) diikuti oleh para Anggota Komisi IV DPR RI.

D. WAKTU DAN LOKASI KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ini dilaksanakan di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah tanggal 16-8 Juni 2022.

E. OBJEK KUNJUNGAN KERJA

Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah terkait penanganan PMK dan pengendalian pencemaran akibat limbah industri. Dalam kunjungan tersebut Komisi IV DPR RI melakukan pertemuan dan diskusi dengan Bupati Klaten beserta

jajarannya dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta melakukan peninjauan ke lokasi industri mie soun.

F. GAMBARAN UMUM KABUPATEN KLATEN

Wilayah Kabupaten Klaten terletak antara:

- BujurTimur :110⁰ 26' 14" – 110⁰ 47' 51"
- Lintang Selatan :7⁰ 32' 19" – 7⁰ 48' 33"

Wilayah Kabupaten Klaten berbatasan dengan Kabupaten:

- Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali
- SebelahTimur : Kabupaten Sukoharjo
- Sebelah Selatan : Kabupaten Gunungkidul (DIY)
- Sebelah Barat : Kabupaten Sleman (DIY)

Wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi tiga dataran:

- Sebelah Utara : Dataran Lereng Gunung Merapi
- Sebelah Timur : Membujur Dataran Rendah
- Sebelah Selatan : Dataran Gunung Kapur

Adapun secara topografi Kabupaten Klaten terletak di antara Gunung Merapi dan Pegunungan Seribu dengan ketinggian antara 75 hingga 160 meter Di atas Permukaan Laut yang terbagi menjadi wilayah Lereng Gunung Merapi di bagian utara areal miring, wilayah datar, dan berbukit di bagian selatan.

Jika ditinjau dari ketinggiannya, Kabupaten Klaten terdiri dari dataran dan pegunungan yang berada pada ketinggian bervariasi, yaitu 9,72 persen terletak di ketinggian 0–100 meter dari permukaan air laut. 77,52 persen terletak di ketinggian 100–500 meter dari permukaan air laut dan 12,76 persen terletak di ketinggian 500–1.000 meter dari permukaan air laut.

Keadaan iklim Kabupaten Klaten termasuk iklim tropis dengan musim hujan dan kemarau silih berganti sepanjang tahun, temperatur udara rata-rata 28–30 derajat Celsius dengan kecepatan angin rata-rata sekitar 153 milimeter setiap bulannya dengan curah hujan tertinggi pada

Bulan Januari (350 mm) dan curah hujan terendah pada Bulan Juli (8 mm).

Sebagian besar wilayah kabupaten ini adalah dataran rendah dan tanah bergelombang. Bagian barat laut merupakan pegunungan, bagian dari sistem Gunung Merapi. Ibukota kabupaten ini berada di jalur utama Solo-Yogyakarta.

Keadaan Wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi 3 (tiga) dataran:

1. Wilayah Lereng Gunung Merapi (wilayah bagian utara) membentang di sebelah utara meliputi sebagian kecil sebelah utara wilayah Kecamatan Kemalang, Karangnongko, Jatinom dan Tulung.
2. Wilayah Dataran (wilayah bagian tengah) yang meliputi wilayah kecamatan: Manisrenggo, Klaten Tengah, Klaten Utara, Klaten Selatan, Kalikotes, Ngawen, Kebonarum, Wedi, Jogonalan, Prambanan, Gantiwarno, Delanggu, Wonosari, Juwiring, Ceper, Pedan, Karangdowo, Trucuk, Cawas, Karangnom dan Polanharjo.
3. Wilayah Berbukit/Gunung Kapur (wilayah bagian selatan) yang membujur di sebelah selatan meliputi sebagian kecil sebelah selatan Kecamatan Bayat, Cawas dan sebagian Gantiwarno.

Melihat keadaan alamnya yang sebagian besar adalah dataran rendah dan didukung dengan banyaknya sumber air, maka daerah Kabupaten Klaten merupakan daerah pertanian yang potensial disamping penghasil kapur, batu kali dan pasir yang berasal dari Gunung Merapi.

Ketinggian Daerah:

- ✓ Sekitar 3,72% terletak diantara ketinggian 0–100 meter di atas permukaan laut.
- ✓ Terbanyak 83,52% terletak diantara ketinggian 100–500 meter di atas permukaan laut.

- ✓ Sisanya 12,76% terletak diantara ketinggian 500–2.500 meter di atas permukaan laut.

Ekonomi Kabupaten Klaten

Usaha pengembangan ekonomi nasional di Kabupaten Klaten meliputi koperasi dan KUD. Dengan 34 KUD dan peminjam 7.966 orang dengan neraca pinjaman sebesar Rp16.924.685.000,00 jumlah anggota bersifat fluktuatif dari 165.043 pada tahun 2013 menjadi 164.935 pada tahun 2014. Realisasi investasi di Kabupaten Klaten pada industri besar dan menengah tahun 2014 dengan tenaga terserap sebanyak 12.618 orang dan jumlah investasi sebesar Rp623.604.195 (dalam jutaan rupiah), sedangkan untuk industri kecil dengan tenaga terserap sebanyak 139.045 orang dengan nilai investasi Rp986.211.337 (dalam jutaan rupiah).

Gambaran Umum Perkembangan PMK di Indonesia dan Provinsi Jawa Tengah

No	Provinsi Tertular	Jumlah Kab./Kota Tertular	Status (ekor)				Sisa Kasus / Belum Sembuh
			Sakit	Sembuh	Pemotongan Bersyarat	Mati	
Prosentase Status			1,81%	31,54%	0,89%	0,58%	66,99%
Jumlah			209.561	66.092	1.873	1.216	140.380
1	Aceh	14	25.289	14.519	24	159	10.587
2	Banten	5	961	27	2	-	932
3	Bengkulu	4	174	3	-	-	171
4	DI Yogyakarta	4	4.493	200	18	17	4.258
5	DKI Jakarta	4	610	-	20	10	580
6	Jambi	8	617	250	12	1	354
7	Jawa Barat	25	21.355	5.342	523	358	15.132
8	Jawa Tengah	35	23.789	5.149	260	117	18.263
9	Jawa Timur	38	83.186	12.852	669	449	69.216
10	Kalimantan Barat	8	1.151	381	38	2	730
11	Kalimantan Selatan	3	287	220	1	7	59
12	Kalimantan Tengah	3	194	109	56	-	29
13	Kepulauan Bangka Belitung	6	2.426	2.136	68	17	205
14	Lampung	4	275	126	13	4	132
15	Nusa Tenggara Barat	5	31.833	18.324	102	50	13.357
16	Riau	6	224	84	-	1	139
17	Sumatera Barat	16	3.624	471	4	4	3.145
18	Sumatera Selatan	6	206	58	22	7	119
19	Sumatera Utara	12	8867	5841	41	13	2.972

Per 20 Juni 2022 PMK terdapat pada 19 Provinsi, 206 Kabupaten/kota, dengan populasi 209.561 ekor sakit (1,81% dari populasi sapi dan kerbau di seluruh Kabupaten/Kota tertular sebanyak 11.557.773 ekor), pemotongan bersyarat 1.873 (0,89%), mati 1.216 (0,58%), vaksinasi 1.519 ekor, sudah sembuh 66.0921 ekor (31,54%). Selain sapi dan kerbau, terdapat juga kambing, domba, dan babi yang

sakit PMK sebanyak 1.473 ekor, sembuh 490 ekor, potong bersyarat 15 ekor, dan mati 6 ekor. Per 15 Juni, populasi ternak terdampak di Kabupaten Klaten sebanyak 956 ekor yang sakit, 109 potong bersyarat. Adapun bantuan yang telah disalurkan ke Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut (per 15 Juni 2022):

Jenis Logistik	Jumlah
Vitamin	102botol
Penambah Energi	96botol
Antipiretik	96botol
Antibiotik	25botol
Desinfektan	23kg
APD	25pcs
Sprayer	3buah

Kronologi PMK di Kabupaten Klaten

- Kasus Pertama dilaporkan tanggal 11 Mei 2022 di Dukuh Nalan, Desa Tarubasan, Kecamatan Karangnom, 2 ekor sapi terkonfirmasi POSITIF PMK oleh Lab. BBV Wates (sapi baru berasal dari pasar).
- Kasus Kedua: dilaporkan tanggal 12 Mei 2022 di Dukuh Genengsari, Desa Tegalmulyo, Kecamatan Kemalang, 4 ekor sapi terkonfirmasi POSITIF PMK oleh Lab. BBV Wates (sapi baru dari pasar hewan).
- Kasus Ketiga: dilaporkan tanggal 12 Mei 2022 di Dukuh Temuireng, Desa Temuireng, Kecamatan Jatinom, 2 ekor sapi terkonfirmasi NEGATIF PMK oleh Lab. BBV Wates (Sapi baru dari pasar hewan).
- Kasus Keempat: dilaporkan tanggal 13 Mei 2022 di Dukuh Genengsari, Desa Tegalmulyo, Kecamatan Kemalang, 12 ekor sapi

dengan status SUSPEK PMK (sapi adalah ternak lama yang tertular).

- Kasus kelima: dilaporkan tanggal 14 Mei 2022 di Dukuh Bakungan, Desa Gedongjetis, Kecamatan Tulung, 3 ekor sapi dengan status SUSPEK PMK (sapi baru dari pasar hewan).

Dari kelima kasus tersebut di atas, diketahui prosentase asal ternak sakit adalah sebagai berikut:

Pasar Bekonang	Blantik	Pasar boyolali	Pasar Delanggu	Pasar Jatinom	Pasar Kartosuro	Pasar Prambanan	Ternak Lama
1,16%	30,31%	2,09%	0,12%	4,41%	0,35%	2,44%	59,12%

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa penyebab ternak lama tertular PMK adalah berasal dari pembelian ternak baru, yaitu ternak sakit berasal dari pasar hewan sebesar 10,57%, ternak sakit milik blantik sebesar 30,31%, sedangkan ternak lama yang sakit di daerah tertular sebesar 59,12%.

G.HASIL KUNJUNGAN KERJA

1. BIDANG PERTANIAN

Tim Komisi IV DPR RI melakukan pertemuan dan diskusi bersama dengan Wakil Bupati Kabupaten Klaten yang juga dihadiri oleh unsur Forkompinda Kabupaten Klaten, mitra kerja Komisi IV DPR RI, dan seluruh stakeholder terkait. Tim Komisi IV DPR RI menerima penjelasan terkait kronologis PMK di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Klaten, termasuk di dalamnya langkah-langkah yang akan diambil serta hambatan/tantangan yang dihadapi. Beberapa hal yang menjadi catatan dalam pertemuan diantaranya adalah penanganan PMK dinilai masih kurang optimal, hal tersebut disebabkan salah satunya sarana/fasilitas untuk pencegahan PMK yang masih perlu ditingkatkan lagi, termasuk

sarana/fasilitas yang bertujuan untuk penekanan penyebaran virus dan pengebalan terhadap ternak. Selain itu, mempertanyakan akurasi data yang disampaikan Pemerintah, salah satunya karena pada saat input data tidak maksimal. Input data berdasarkan laporan dari dokter hewan, sementara jumlah dokter hewan sangat terbatas.

Penyebaran penyakit/suspek sebagian besar melalui blantik atau alur perdagangan. Oleh karena itu, perlu penguatan karantina di perbatasan. Tidak dapat dipungkiri, di beberapa daerah kondisi perbatasan antar provinsi, antar kabupaten yang menjadi kewenangan penda setempat tidak berjalan dengan baik. Sarana yang dimiliki juga kurang memadai. Hal lain yang menjadi perhatian adalah masih minimnya informasi ke daerah terkait cara penanganan PMK yang sudah menjangkiti hewan ternak di beberapa wilayah Indonesia, khususnya alokasi anggaran penanganan PMK. Hingga saat ini, masih banyak kepala daerah yang belum paham untuk mengalokasikan anggaran penanganan PMK. Pemerintah pusat perlu lebih intensif dalam menyosialisasikan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri tentang dukungan dan antisipasi wabah PMK pada ternak, dimana salah satu poinnya adalah pendanaan untuk pengendalian dan penanggulangan wabah ini dianggarkan dalam APBD.

Untuk itu, kementerian terkait agar melakukan *refocusing* anggaran atau menggunakan anggaran yang belum terpakai untuk pembelian vaksin hewan ternak, mengingat hewan ternak yang terdampak terus bertambah dan semakin meluas. Upaya yang dilakukan dengan segera memberikan bantuan antara lain berupa vitamin, obat-obatan, disinfektan dan juga vaksin. Pemerintah juga harus melakukan percepatan pendistribusian vaksin PMK sebagai upaya pengendalian penyebaran PMK pada hewan ternak. dengan mengutamakan daerah prioritas yang terkena wabah cukup parah. Terkait memastikan keamanan dan

kelancaran pelaksanaan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1443 H, sebaiknya berpedoman pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban Saat Kondisi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku.

2. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kegiatan kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah diawali dengan pertemuan di Kantor Bupati, yang dihadiri oleh SKPD terkait, untuk memperoleh informasi terkait upaya penanganan PMK dalam rangka menjaga pasokan sapi, serta upaya pengendalian pencemaran air akibat limbah industri mie soun di Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Catatan dalam pertemuan tersebut terkait pengendalian pencemaran air akibat limbah industri pengolahan mie soun yaitu keluhan masyarakat sekitar yang terdampak dimana sebagian besar industri pengolah mie soun limbahnya langsung dibuang ke Sungai Bendo tanpa diolah terlebih dahulu melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) perorangan maupun IPAL terpadu, hal tersebut menyebabkan pencemaran air baik itu badan air sungai maupun air tanah serta menimbulkan pencemaran udara berupa bau yang sangat menyengat. Dampak lanjutan dari cemaran tersebut adalah krisis air bersih, baik itu yang berasal dari sungai maupun air tanah (sumur), masyarakat setempat kini tidak dapat lagi menggunakan air sumur untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan dalam jangka panjang pencemaran tersebut dapat mengancam kesehatan masyarakat sekitar.

Tim Komisi IV DPR RI didampingi pejabat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selanjutnya melakukan kunjungan lapangan di Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, merupakan daerah sentra industri rumah tangga mie soun yang berbahan dasar pati aren dan industri rumah

tangga pendukungnya, dimana jumlah unit usaha yang memproduksi terus bertambah dari tahun ke tahun. Saat ini tercatat ada 59 industri rumah tangga pengolah mie soun dan pendukungnya dengan rincian:

- 14 unit usaha pengrajin produksi aren.
- 14 unit usaha pengrajin produksi soun.
- 24 unit usaha pengrajin pengeringan pati.
- 7 unit usaha pengrajin pengeringan aren.

Semakin meningkatnya pertumbuhan industri rumahan pengolahan mie soun, maka semakin meningkat pula limbah yang dihasilkan dan mengakibatkan permasalahan lingkungan yang cukup kompleks.

Upaya pengendalian pencemaran air akibat limbah pengolahan mie soun di Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah dan DLHK Kabupaten Klaten dengan jalan sosialisasi dan pengawasan kepada industri rumah tangga pengolah mie soun, namun upaya tersebut belum memberikan hasil yang maksimal meningkatkan kesadaran untuk menurunkan jumlah limbah yang dibuang ke badan air sebelum diolah, hal ini terjadi salah satunya masih minimnya instalasi pengolahan air limbah yang dimiliki oleh industri rumah tangga pengolah mie soun. Untuk membangun IPAL bagi industri rumahan dirasa sangat berat, karena membutuhkan biaya yang sangat besar, pencemaran diperparah karena belum adanya IPAL komunal yang terintegrasi dengan IPAL masing-masing industri rumah tangga yang menampung dan mengolah air limbah sebelum air dibuang ke badan air.

Upaya lain pengendalian pencemaran air akibat pembuangan limbah mie secara langsung ke badan air telah dilakukan salah satunya dengan pembangunan IPAL terpadu. Pada tahun 2014, Pemerintah Denmark melalui KLHK dalam hal ini Setditjen PSLB3, memberikan bantuan berupa hibah pembangunan IPAL terpadu untuk seluruh industri mie soun di Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Seluruh pembiayaan mulai dari penyusunan FS/DED, proses tender, pembangunan IPAL, pengawasan, sampai uji coba fungsi (*commissioning*) IPAL semuanya oleh Pemerintah Denmark, tidak ada

dana pendampingan dari Pemerintah Indonesia. Pembangunan konstruksi IPAL dimulai tahun 2015, dengan target waktu penyelesaian tahun 2019, pembangunan IPAL selesai sesuai target, dilanjutkan dengan uji coba fungsi (*commissioning*) IPAL. Namun setelah uji coba fungsi, IPAL belum berfungsi maksimal, sehingga perlu perbaikan dan review teknologi yang digunakan. Proses ini terhenti sejak pandemi Covid-19 awal Tahun 2020 sampai saat ini. Sehingga sampai dengan saat ini, air limbah proses dari industri mie soun masih dibuang ke lingkungan tanpa pengolahan terlebih dahulu.



Gambar: Kegiatan Industri Pengolahan Mie Soun di Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah

(Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Juni 2022)



Gambar: Bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Hibah dari Pemerintah Denmark di Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah

(Sumber: Media DPR-RI, Juni 2022)

H. KESIMPULAN

1. Komisi IV DPR RI mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menangani dan mengendalikan penyakit PMK dengan melakukan lokalisir melalui pelarangan lalu lintas hewan ternak dari dan ke Kabupaten Klaten secara bersama-sama dengan Masyarakat.
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar mengalokasikan anggaran untuk penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengalokasikan penambahan anggaran berupa vaksin dan obat-obatan hewan. Selanjutnya kepada Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk selalu menyediakan antibiotik dan vaksin untuk masyarakat terkait upaya penanganan dan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku.
4. Komisi IV DPR RI meminta Balai Besar Veteriner untuk melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi secara periodik kepada masyarakat mengenai penyakit hewan ternak terutama yang bersifat zoonotik, jangan hanya ketika terjadi *outbreak* saja.
5. Komisi IV DPR RI meminta pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memetakan sebaran dan besaran dampak pencemaran akibat limbah pengolahan mie soun.
6. Komisi IV DPR RI meminta pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama-sama dengan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Klaten c.q. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha rumah tangga mie soun dalam rangka upaya pengendalian pencemaran air akibat limbah mie soun.

7. Komisi IV DPR RI meminta pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ditjend PSLB3 perlu segera mendorong Pemerintah Denmark melanjutkan perbaikan dan uji coba fungsi IPAL, sehingga dapat segera difungsikan, untuk selanjutnya diserahkan terimakan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.

I. PENUTUP

Demikian Hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI terkait upaya penanganan penyakit mulut dan kaki dalam rangka menjaga pasokan sapi dan daging serta upaya pengendalian pencemaran air akibat limbah industri pengolahan mie soun di Kabupaten Klaten. Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan, usulan, dan aspirasi yang telah disampaikan dalam rapat, baik Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta mitra terkait lainnya. Semoga kunjungan ini membawa manfaat dalam rangka melindungi masyarakat dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jakarta, Juni 2022

Ketua Tim,

Ttd.

Anggia Ermarini, MKM.

A-41

LAMPIRAN

1. Liputan Kegiatan di Media

- ✓ <https://klatenkab.go.id/perkembangan-kasus-pmk-di-klaten-jadi-perhatian-khusus-komisi-iv-dpr-ri/>
- ✓ <https://halosemarang.id/ratusan-ternak-di-klaten-suspek-pmk-komisi-iv-dpr-ri-vaksin-segera-didistribusikan>
- ✓ <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39381/t/Komisi+IV+Dorong+Strategi+Percepatan+Vaksinasi+PMK>
- ✓ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39378>
- ✓ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39381>
- ✓ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0VnncefgUDNeoCrZNS5q61csvNGaPfi5wPhPNfXyHoHP9tg7kXCngw1GPRnGgYjTfl&id=100069006316392&sfnsn=wiwspwa
- ✓ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid037HccNuQUZm58fnP8Z5SC6Y8JQuJA1hsRD2q4dmPAxyVD53Tv6opDkVjxLnCRh7WVI&id=100069006316392&sfnsn=wiwspwa
- ✓ https://twitter.com/DPR_RI/status/1537474595887849472?t=Bz_jpS9cAOv7-5exbmMhw&s=08
- ✓ https://twitter.com/DPR_RI/status/1537471937504456704?t=HhOBDT_x2RaWc9mgk2qzjPQ&s=08
- ✓ <https://www.instagram.com/p/Ce4tVGbvmsg/?igshid=MDJmNzVkMjY>
- ✓ https://www.instagram.com/p/Ce34GYtvLS_/?igshid=MDJmNzVkMjY

2. Dokumentasi



Diskusi di Pendopo Bupati Kabupaten Klaten



Kunjungan Lapangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah